

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengangkat judul “**Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan saat bencana banjir di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur** ” penelitian mengenai analisis kinerja BPBD bukan pertama kali dilakukan, penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga mampu memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah kinerja organisasi terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa jurnal terkait penelitian yang dilakukan penulis:

Penelitian pertama, berjudul Dampak pelaksanaan pelatihan mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bagi masyarakat di kelurahan Cawang, Jakarta Timur. oleh Aulia NurIzzati. E-ISSN: 2580–8060 Vol. 7 No.1 (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana persiapan untuk menghadapi bencana. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dalam upaya pelaksanaan mitigasi bencana oleh BPBD DKI Jakarta sudah cukup baik dilihat dari masyarakat yang merasakan adanya perubahan dari segi pengetahuan terkait langkah-langkah pertolongan pertama pada saat kondisi darurat. Seperti teknik memberi pernapasan, teknik menolong korban tenggelam dan sebagainya.

Penelitian kedua, berjudul analisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir (Studi pelaksanaan peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2014 di kelurahan Pondok Pinang kecamatan Kebayoran Lama kota administrasi Jakarta Selatan). oleh Dede Saidah. Jurnal Media Vol. 2, No.2

Oktober 2020:185-202 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanggulangan bencana banjir di kelurahan Pondok Pinang belum terselenggara secara optimal dengan adanya beberapa kendala disebabkan karena kurangnya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan.

Penelitian ketiga, berjudul Analisis kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi bencana banjir pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan badan penanggulangan bencana daerah, Jakarta Pusat. Oleh Suprapti Widiasih, Zulfaturrohman, Eka Rofiyanti, Vol.1, No.9, Oktober 2022 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persiapan tim BPBD khususnya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi terjadinya bencana banjir. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya kesiapsiagaan dengan tidak adanya perencanaan kedaruratan bencana banjir dalam pelaksanaannya mengalami kendala pada saat dilapangan dan kurang kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada tempatnya.

Penelitian keempat, berjudul Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. oleh Biyan Anugrah Awus, dkk. ISSN: 2337-5736 Vol 1 No. 1 (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Manado dalam upaya penanggulangan korban bencana banjir. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan dan wawancara dapat disimpulkan Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota manado tercapai 70 % dari maksimal 80 %. Data dari warga atau dinas BPBD permasalahan bukan hanya di dapati dari BPBD tetapi di dapati juga dari masyarakat yang tidak sesuai dengan ekspetasi visi BPBD kota Manado.

Penelitian kelima, berjudul Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Jakarta. oleh Agus Taryana, Muhammad Rifa El Mahmudi, Herjanto Bekti, eISSN: 2957-758x pISSN: 2086- 1338 Vol 13 No. 2 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan yang dilakukan sebelum bencana banjir terjadi dan tahap pelaksanaan kesiapsiagaan dengan mengacu pada 5 parameter yaitu pengetahuan terhadap risiko bencana, rencana tanggap darurat, kebijakan dan panduan untuk kesiapsiagaan serta kemampuan memobilisasi sumber daya, hanya saja dalam pelaksanaan kesiapsiagaan harus terus dikembangkan guna memiliki sistem pengawasan yang baik salah satunya maintenance alat agar tetap prima saat digunakan.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil
1.	Aulia NurIzzati, E-ISSN 2580-8060 Vol. 7 No.1, 2022	Dampak Pelaksanaan Pelatihan Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bagi masyarakat di kelurahan Cawang, Jakarta Timur.	Kajian penelitian terdahulu membahas persiapan untuk menghadapi bencana, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana teknik untuk berlindung dan evakuasi dasar ketika terjadi bencana.	Dalam upaya pelaksanaan pelatihan mitigasi bencana oleh BPBD DKI Jakarta masyarakat merasakan adanya perubahan dari segi pengetahuan terkait Langkah-langkah pertolongan pertama pada konsidi darurat, seperti teknik memberi pernapasan buatan, mengobati luka, teknik menolong korban tenggelam, mengangkat tandu dan sebagainya.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil
2.	Dede Saidah Jurnal Media Vol.2, No. 2, Oktober 2020: 185-202	Analisis Implementasi Kebijakan penanggulangan bencana banjir (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 di kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama kota administrasi Jakarta Selatan)	Kajian penelitian terdahulu membahas bagaimana implementasi penanggulangan bencana banjir oleh SKPD sesuai Peraturan Gubernur no 39 tahun 2014 di wilayah Pondok Pinang Jakarta Selatan.	Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang belum terselenggara secara optimal. Beberapa kendala yang ditemui disebabkan karena kurangnya kemampuan dan komitmen aparat pelaksanaan serta kurangnya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan.
3.	Suprapti Widiasih, Zulfaturrohman, Eka Rofiyanti. Vol. 1, No.9, Oktober 2022.	Analisis kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi bencana banjir pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan badan penanggulangan bencana daerah Jakarta pusat.	Kajian penelitian terdahulu menganalisis Kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi bencana banjir pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta Pusat	Belum optimalnya kesiapsiagaan dengan tidak adanya perencanaan kedaruratan bencana banjir dalam pelaksanaannya mengalami kendala pada saat dilapangan hal ini mengakibatkan terhambatnya proses kesiapsiagaan bencana banjir diantaranya kesadaran masyarakat masih kurang untuk tidak buang sampah dikali atau tidak diselokan, kesiapsiagaan petugas masih perlu diperhatikan, faktor infrastruktur masih perlu diperhatikan.

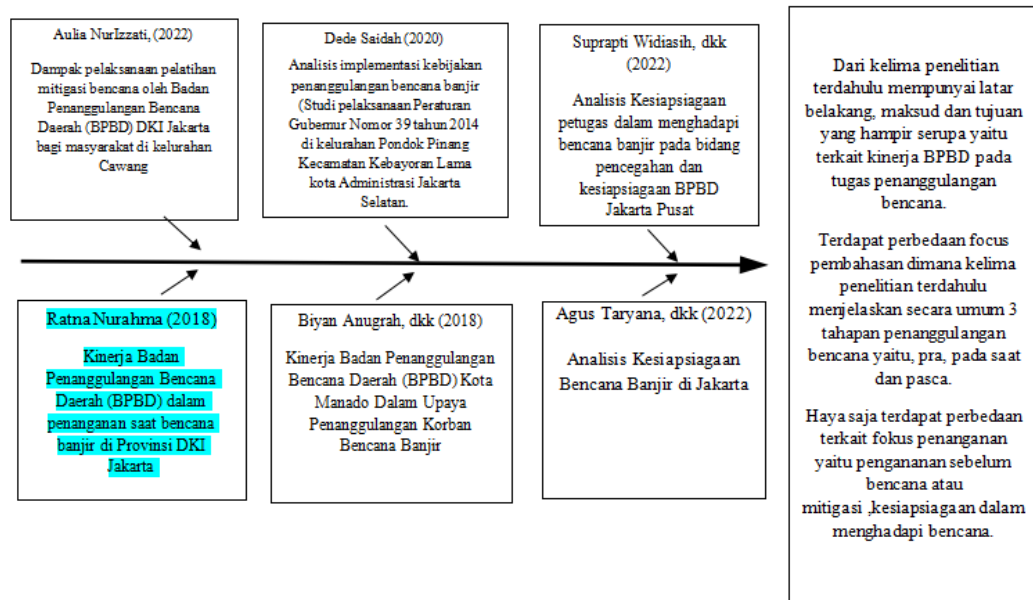
No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil
4.	<p>Biyani Anugrah Awusi, Herman Nayoan, Jones Tompodung</p> <p>ISSN: 2337 - 5736 Vol. 1 No.1. Tahun 2018</p>	<p>Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir.</p>	<p>Kajian penelitian terdahulu membahas upaya dalam penanggulangan bencana banjir kota Manado.</p>	<p>Dalam penanggulangan bencana banjir bandang belum terlaksananya kinerja BPBD dengan baik, diantaranya terdapat kurangnya alat/sarana yang belum memadai dan ditambah juga dengan keterbatasan sumber daya manusia yang belum professional di bidang kebencanaan khususnya dalam penanggulangan bencana kota Manado.</p>
5.	<p>Agus Taryana, Muhammad Rifa El Mahmudi, Herjanto Bekti</p> <p>eISSN: 2597- 758x pISSN: 2086- 1338 Vol 13 No. 2 Tahun 2022</p>	<p>Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Jakarta</p>	<p>Kajian penelitian terdahulu membahas bagaimana persiapan sebelum menghadapi datangnya bencana banjir dan memerlukan beberapa parameter untuk penilaian bahwa DKI Jakarta sudah siap menghadapi bencana banjir.</p>	<p>Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan DKI Jakarta terhadap bencana banjir sudah dilakukan dengan baik, dapat dilihat dari 5 parameter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana 2. Rencana tanggap darurat 3. Kebijakan, peraturan dan panduan untuk kesiapsiagaan 4. Sistem peringatan 5. Kemampuan memobilisasi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil
				<p>sumber daya Hanya saja dalam pelaksanaan kesiapsiagaan ini harus terus dikembangkan agar memiliki sistem pengawalan yang baik, salah satunya maintenance alat agar tetap prima saat digunakan dan membuat kebijakan-kebijakan serta program-program untuk pencegahan bencana banjir.</p>

Pada penelitian terdahulu mengulas terkait dampak pelatihan mitigasi bencana oleh BPBD DKI mengedepankan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan, hal tersebut berada pada phase pra bencana dimana pencegahan menjadi titik utama. Akan tetapi pelatihan berfokus kepada tindakan-tindakan awal pada saat penanganan bencana seperti penanganan terhadap korban, evakuasi ringan, pengenalan peralatan² pencegahan bencana sehingga dapat menjadi masukan yang baik dalam menilai kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditemukan perbedaan. Pada penelitian saat ini berfokus kepada kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta pada saat penanganan bencana banjir. Seperti pelayanan evakuasi korban bencana, siapa saja yang terlibat pada saat bencana banjir, Sedangkan pada penelitian terdahulu penelitian berfokus pada pra bencana yaitu dengan mensosialisasikan pemahaman masyarakat terkait persiapan saat bencana banjir.

Gambar 2.1 Diagram Fishbone



2.2. Kajian Teori

2.2.1. Pengertian Kinerja Organisasi

Robbins (Gusti, 2008:40) menyatakan kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kinerja yang telah ditetapkan bersama.

Surjadi (2009:7) menyatakan bahwa kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapai tujuan organisasi berarti bahwa kinerja organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Bastian (2001:329) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian: pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut.

Menurut Dwiyanto (2008:47). pengertian dari kinerja organisasi adalah suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran

keberhasilan suatu organisasi pelayanan publik dalam mencapai misinya untuk memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Kinerja organisasi menurut pendapat di atas adalah kegiatan yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi pelayanan publik. Pencapaian keberhasilan pelayanan publik tersebut agar sesuai dengan sasaran dan harapan.

Menurut Mahsun (2006:25) dalam bukunya *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, menjelaskan tentang kinerja organisasi bahwa “kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”. Pendapat di atas dapat dijabarkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu gambaran tentang peningkatan suatu pencapaian kegiatan organisasi. Tingkat pencapaian tersebut dilihat dari sasaran, visi dan misi dari organisasi tersebut.

Menurut Steers (2003:67) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai.

Kinerja organisasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansi yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya. Kinerja merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat di jelaskan bahwa definisi kinerja organisasi merupakan prestasi atau tingkat keberhasilan kelompok. Kinerja tersebut dapat diketahui keberhasilannya jika tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja organisasi dipengaruhi strategi perencanaan mulai dari tujuan, sasaran, visi dan misi dari sebuah organisasi pelayanan publik.

2.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Mahmudi (2013:20) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

Faktor personal meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

1. Faktor Kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
2. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim kekompakan dan keeratan anggota tim.
3. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
4. Faktor kontekstual (situasioal), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Sedangkan menurut Gibson (2018:123) 3 faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu:

1. Faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
2. Faktor psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja
3. Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan.

2.2.3.Indikator Kinerja Organisasi

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi, yang terdiri atas beberapa faktor berikut:

1. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.

2. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers.
5. Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.

Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson yang dikutip oleh Wibowo (2011:102) terdapat tujuh indikator kinerja yaitu:

1. Tujuan merupakan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu dan organisasi untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan diperlukan kinerja individu, kelompok dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.
3. Alat atau sarana, merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat atau sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.
4. Kompetensi, merupakan persyaratan utama dalam kinerja, kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik.
5. Motif, merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan

pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan yang mengakibatkan disinsentif.

6. Peluang, pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas dan kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.
7. Umpan balik, antar tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Menurut Dwiyanto (2006:50) dalam (Anwar Musyadad, 2015) Indikator kinerja digunakan sebagai gambaran capaian suatu organisasi dan sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya mengukur kinerja birokrasi publik berdasarkan indikatornya antara lain:

1. Produktivitas

Mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.

2. Kualitas Layanan

Mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat dapat menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi.

3. Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Daya tanggap terdiri dari adanya pemberian pelayanan seperti pemberian informasi yang jelas mengenai kegiatan pelayanan secara cepat dan tepat, sehingga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan dengan cepat dan jelas tanpa merugikan konsumen atau masyarakat.

4. Responsibilitas

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi atau prinsip-prinsip administrasi. Prinsip Responsibilitas terdiri dari adanya Tanggung jawab dan kerjasama antara perusahaan atau *stakeholders*.

5. Akuntabilitas

Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dalam masyarakat. Akuntabilitas organisasi dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. *Legal Accountability*, berkaitan dengan Undang-undang maupun peraturan.
2. *Proses Accountability*, berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber potensi daerah.
3. *Outcome Accountability*, berkaitan efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

2.2.4. Manajemen Bencana

Pelayanan penanggulangan bencana dari tahun ke tahun di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Manajemen bencana diartikan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu;

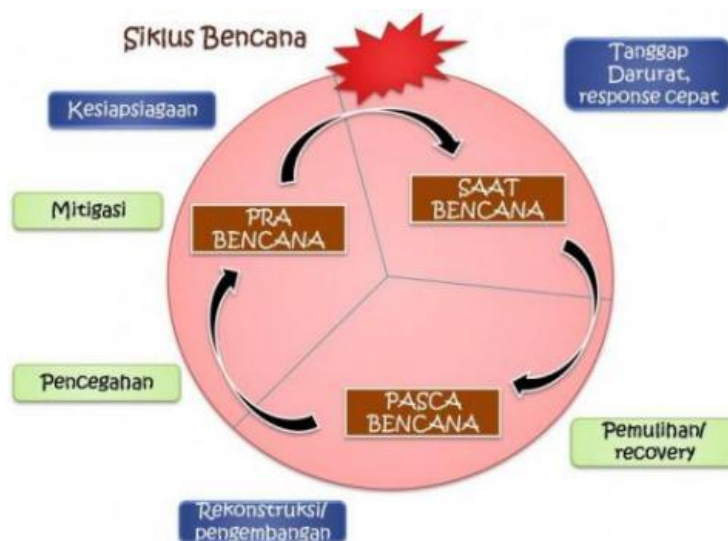
- a. *Sebelum bencana* kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Meliputi kesiapsiagaan yaitu mencakup penyusunan rencana pengembangan sistem peringatan pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil dan juga langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mengalami bencana secara berulang. Mitigasi mencakup semua langkah yang diambil

untuk mengurangi skala bencana di masa mendatang, baik efek maupun kondisi rentan terhadap bahaya itu sendiri,

- b. *Saat bencana* tahapan yang paling penting dalam manajemen bencana adalah ketika bencana terjadi. Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan dengan segera saat bencana terjadi untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Selama bencana terjadi hal yang dilakukan adalah penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tim diharapkan mampu menanggulangi berbagai bentuk bencana, oleh karena itu tim relawan harus diorganisir dan dirancang untuk menangani berbagai jenis bencana.
- c. *Pasca bencana* merupakan tahap yang dilakukan setelah proses tanggap darurat dilewati. Upaya yang dilakukan dalam tahap pasca bencana adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi.

Upaya tersebut merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dalam lingkup siklus penanggulangan bencana. prinsip dan tujuan penanggulangan bencana yaitu koordinasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi sangat penting dalam kegiatan penanggulangan bencana melalui tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya bencana.

Gambar. 2.2 Siklus bencana



2.2.5. Bencana Banjir

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah disisi sungai. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. Akibatnya, sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga terjadi peluapan air. Kemampuan daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, akan tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Fenomena banjir selalu dikaitkan dengan sungai. Banjir terjadi apabila debit air yang mengalir melalui bagian penampang sungai tidak tersalurkan dan tertampung sampai lembah aliran sungai. Tidak tersalurkannya air sungai dengan baik disebabkan oleh badan sungai yang semakin sempit karena didesak permukiman warga. Banjir juga dapat terjadi karena sungai tersumbat sampah sehingga daya mengalirkan air tidak seimbang.

2.2.6. Saat bencana banjir

Pada saat bencana banjir memerlukan suatu tindakan penanganan evakuasi korban bencana segera dilakukan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Secara umum, penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdiri dari tiga tahap meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa, “Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan segera pada saat bencana terjadi untuk menyelamatkan korban atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, penyelamatan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

2.2.7. Tahap Penanganan Saat Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana meliputi:

1. Pengkajian secara cepat

Pengkajian secara tepat dan cepat merupakan suatu tindakan pengambilan data di lapangan pada saat terjadinya bencana. Data tersebut berupa data jumlah korban, data identitas korban, data kerusakan, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menentukan tindakan apa saja yang perlu dilakukan dan juga untuk memenuhi kebutuhan saat terjadinya tanggap darurat bencana.

2. Penentuan status keadaan darurat bencana

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi Pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistic, komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan skala bencana, dimana untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh Gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban.

4. Pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan dan tempat hunian. Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Pelindungan terhadap kelompok rentan

Perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan (bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia) berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

7. Standar Manajemen

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

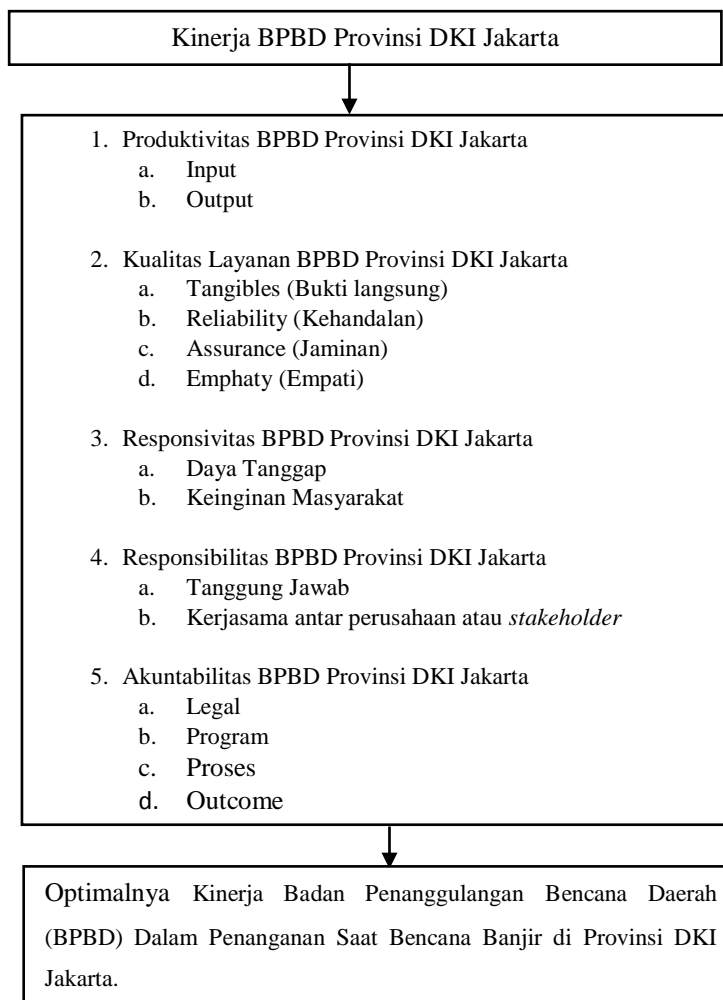
2.3. Kerangka Berfikir

Kinerja organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuannya, termasuk kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir yang merupakan daerah yang sering terkena banjir yang tentunya membutuhkan perhatian yang serius.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengarahkan penelitian ini agar tepat sasaran dan untuk melihat keberhasilan kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir, maka dibutuhkan kerangka berfikir indikator pengukuran kinerja organisasi. Untuk mempermudah kerangka berfikir, maka dibuatlah bagan sebagai berikut

Gambar 2.3.

Kerangka Pikir Penelitian



:

Dari kerangka berfikir di atas indikator yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Produktivitas adalah perbandingan *output* dan *input* yang terkait dengan kinerja BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir yang meliputi:
 - a. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan. *Input* dalam hal ini adalah apakah personil dari BPBD DKI Jakarta sudah mencukupi dalam menanggulangi bencana banjir.

- b. *Output* adalah Hasil yang berupa bentuk fisik atau jasa dari BPBD di Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir. *Output* di sini terdiri dari bentuk fisik dan jasa yang dihasilkan yaitu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Kualitas layanan adalah pelayanan prima yang diberikan BPBD di Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir yang meliputi:
 - a. Bukti langsung adalah kemampuan BPBD di Provinsi DKI Jakarta dalam menunjukkan kepada masyarakat akan fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam penanggulangan bencana banjir seperti perlengkapan dan peralatan yang digunakan.
 - b. Keandalan adalah kemampuan BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang terkena bencana banjir, pelayanan yang sama, sikap yang simpatik.
 - c. Jaminan adalah pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan BPBD di Provinsi DKI Jakarta untuk menumbuhkan rasa percaya pada masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.
 - d. Empati adalah kemampuan BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan perhatian yang tulus bersifat individual yang diberikan kepada korban bencana banjir yang meliputi memahami kebutuhan masyarakat, pemberian pengetahuan secara spesifik waktu pengoperasian bagi warga yang terkena bencana.
3. Responsivitas adalah kemampuan BPBD di Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir untuk mengenali kebutuhan masyarakat yang meliputi:
 - a. Daya Tanggap adalah kemampuan BPBD di Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan secara cepat, penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana banjir.
 - b. Keinginan Masyarakat adalah harapan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir.

4. **Responsibilitas** adalah tindakan BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program kerja yang peka akan situasi dan target yang akan dicapai khususnya dalam penanggulangan bencana banjir yang meliputi:
 - a. **Tanggung Jawab** adalah kesediaan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resiko, memberikan kompensasi atau informasi terhadap masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terkena bencana banjir oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta.
 - b. **Kerjasama** antara perusahaan atau *stakeholder* adalah kemampuan BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana banjir.
5. **Akuntabilitas** adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian kegiatan BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir yang meliputi:
 - a. *Legal Accountability*, adalah sejauh mana kesesuaian dengan Undang-undang maupun peraturan yang dapat dijalankan oleh BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir.
 - b. *Program Accountability*, adalah pencapaian program-program yang dijalankan oleh BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir.
 - c. *Proses Accountability*, adalah pemanfaatan sumber-sumber potensi daerah oleh BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir,
 - d. *Outcome Accountability*, adalah manfaat yang dapat di peroleh masyarakat wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Indikator-indikator pengukuran di atas sangat berpengaruh untuk melihat pencapaian tujuan organisasi, dalam hal ini instansi pemerintahan khususnya

mengenai kinerja BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi bencana banjir. Bencana merupakan kejadian yang disebabkan oleh alam atau manusia yang dapat menyebabkan kerugian harta, kematian dan kerusakan lingkungan khususnya bencana banjir. Banjir merupakan meluapnya air ke permukaan yang melebihi batas normal sehingga menyebabkan kerugian terhadap manusia yang dapat datang secara tiba-tiba, tidak bisa ditetapkan waktu terjadinya, sehingga perlu adanya penanggulangan bencana khususnya bencana banjir.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja adalah hasil kerja BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana banjir.
2. Organisasi adalah keseluruhan perangkat BPBD Provinsi DKI Jakarta yang bekerja untuk menanggulangi bencana banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Kinerja Organisasi adalah hasil yang di capai oleh BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta.
4. BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah perangkat daerah DKI Jakarta yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Kinerja BPBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat diukur dari suatu keberhasilan dalam penanggulangan bencana banjir, dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut: